

HUKUM PERDATA

**PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Program Sarjana
Program Studi : Hukum**



.Diajukan Oleh :

**RUDI HARTONO
NPM : 1974201001415**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HUKUM PERDATA

**PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

RUDI HARTONO
NPM : 1974201001415

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 27 Juli 2024

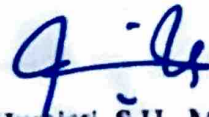
Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line that curves downwards at the right end, with a short vertical line extending from the left side.

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent loop at the end.

Humiati, S.H., M.Hum.

PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RUDI HARTONO
NPM : 1974201001415

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 27 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



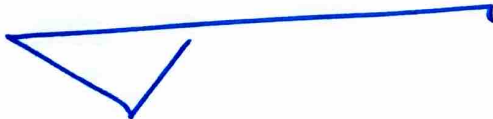
Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kesalahpahaman dalam penafsiran kontrak pengadaan dapat menimbulkan berbagai permasalahan kontraktual. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PBJ *juncto* Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PBJ menjadi dasar hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kerap kali terjadi bahwa pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk menentukan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan tender itu sendiri, yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada para pelaku bisnis untuk memperoleh barang dan jasa berkualitas dengan harga rendah dan murah.

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana prinsip-prinsip hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa, dan bagaimana analisis hukum terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LPM dan PUTS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan atas dasar data sekunder yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menganalisis teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penelitian ini lebih menekankan pada prinsip transparansi yang memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekedar menerapkan proses yang terbuka. Pemerintah harus berusaha untuk memahami dan menerapkan prinsip transparansi secara efektif dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih bermakna. Sedangkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah bilamana terjadi persekongkolan pemenangan tender oleh pelaku usaha sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi tambahan sesuai yang ditetapkan. Selanjutnya dalam hal terjadinya sengketa dan perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa, prinsip hukum, persekongkolan tender.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Juli 2024

Penulis



RUDI HARTONO
NPM. 1974201001415

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kendala dan kesulitan, namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, kendala dan kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala dukungannya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dari kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Humiati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini di tengah kesibukannya, dengan membagikan ilmunya serta memberikan arahan, saran, nasihat, dan bimbingan dengan penuh kehati-hatian, kesabaran dan ketulusannya.

4. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah membantu penulis dengan berbagai saran dan masukan yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis mengucapkan terima kasih atas semua atas bimbingan, pendidikan dan arahnya.
6. Kedua orang tua penulis yang dengan sangat tulus selalu memberikan do'a dan semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
7. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bagi seluruh pembaca.

Pasuruan, 27 Juli 2024
Penulis

RUDI HARTONO
NPM. 1974201001415

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Hukum	
1. Pengertian Prinsip-Prinsip Hukum	13
2. Teori Tentang Prinsip-Prinsip Hukum	16
3. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa	20

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak	
1. Pengertian Kontrak	23
2. Asas, Tujuan, Manfaat dan Teori Kontrak	26
3. Macam-Macam Kontrak	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa	
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	34
2. Macam-Macam Pengadaan Barang dan Jasa	35
3. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa	37
4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	44
B. Ruang Lingkup Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV : PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH	
A. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa	50
B. Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang	

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat 59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA